

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN *PLURALISME* AGAMA KH. ABDURRAHMAN WAHID DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Masyarakat dan Pendidikan Islam di Indonesia

Masyarakat Indonesia telah sejak berabad-abad yang lalu hidup dalam kemajemukan dan berbasis pada multikultural lapisan etnisitas dan agama-agama.¹ Setiap kelompok memiliki pandangan tentang sistem nilai yang dipegang sebagai landasan hidupnya. Sistem nilai itu disebut sub ideologi, sehingga dalam suatu bangsa yang majemuk terdapat sub-sub ideologi dan ideologi nasional menjadi konsensus berbagai kelompok kepentingan (merupakan hasil konsensus berbagai sub ideologi). Masyarakat majemuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap Tuhan YME sebagai ideologi nasional yang termaktub dalam pancasila.

Pancasila sebagai *common platform*, yaitu landasan bagi tumbuhnya ideologi-ideologi yang beragam dan menjadi *kalimatun sawa*' bagi kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang keagamaan yang beragam. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk relatif besar, menempati urutan ketiga setelah China dan India. Pluralitas etnik, budaya, bahasa, dan agama serta ideologi –bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi kekakayaan ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan dapat memberikan nuansa dinamika bangsa, namun di sisi lain kemajemukan inilah menjadi pemicu terjadinya konflik dengan disertai kekerasan dengan dalih etnis dan agama. Kekerasan dan kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi di belahan penjuru daerah nusantara menunjukkan tidak adanya sikap yang arif dan bijak terhadap perbedaan yang ada.² Gejala ini

¹ M. Jadra, "Pluralisme...", hlm. 295

² Kasus kekerasan dan kerusuhan terjadi karena berawal dari adanya perbedaan cara pandang sepihak yang menganggap pihak lain sebagai lawan, keliru, dan harus dilawan. Muqowim, "Shifting...", hlm. 346

dapat muncul setiap saat dan harus tetap diwaspadai. Berbagai pihak baik aparat pemerintah, tokoh politik, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat untuk segera menemukan solusi pemecahannya.

Dalam kehidupan masyarakat majemuk yang diperlukan adalah penghormatan atas berkembangnya budaya masyarakat dengan segala bentuknya. Hal ini dikarenakan budaya menjadi salah satu faktor perekat sosial demi tegaknya kehidupan yang harmonis bagi suatu bangsa dan masyarakat dalam rangka membangun kehidupan yang lebih maju di era globalisasi dan modernisasi. Budaya sebagai hasil karya masyarakat merupakan eksistensi asasi dari manusia yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena dengan ini akan tercipta kesatuan dalam keaneka-ragaman. Manusia merupakan makhluk sosial yang membawa karakter biologis dan psikologis alamiah sekaligus warisan dari latar belakang historis kelompok etniknya, yaitu pengalaman kultural dan warisan kolektif. Dengan demikian perilaku, sikap dan nilai manusia sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Perilaku manusia adalah hasil dari proses sosialisasi dan sosialisasi selalu terjadi dalam konteks lingkungan etnik, kultur dan agama.³

Para pakar sepakat bahwa faktor utama peristiwa kekerasan dan kerusuhan terjadi adalah kesenjangan ekonomi dan sosial dan sangat sedikit sekali mencurigai agama sebagai faktor yang cukup signifikan dan potensial dalam memicu kerusuhan yang berbau SARA. Ada keseganan tersendiri dari para pakar untuk menyebut agama sebagai penyebab konflik di nusantara, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius.⁴ Sehingga tertutup sudah usaha-usaha untuk mempertanyakan ulang bagaimana proses praktik pengajaran agama di sekolah-sekolah baik formal, in formal maupun non formal. Justeru proses pembelajaran selama ini telah melakukan kekerasan secara sistemik. Hal ini terlihat dari model pengajaran agama yang cenderung bersifat monolitik: melihat sesuatu dari satu sudut pandang: benar-salah, baik

³Zakiyuddin Baidhawiy, "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural", *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi 16 Tahun 2004, hlm. 114

⁴Munir Mulkhan, "Humanisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi 11 Tahun 2001, hlm. 17-25

buruk, surga-neraka. Belum adanya saling menghormati atas perbedaan yang ada, seandainya sudah, paling hanya pada permukaan belaka yang bersifat formal simbolik.

Pendidikan agama merupakan usaha yang tersistematisir sebagai upaya mentransfer nilai-nilai religius –dalam hal ini yang digarap meliputi aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik- kepada peserta didik dinilai telah gagal. Kegagalan ini dikarenakan pendidikan belum mampu menelorkan SDM yang kritis, kreatif dan inovatif serta keluhuran budi penuh etika-moral. Selama ini Proses pembelajaran baru dapat menyentuh aspek kognitif dan afektif dan jauh terhadap pencapaian ranah psikomotorik. Yang disebut terakhir ini sangat esensial bagi umat religius: berkaitan dengan kepekaan manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada masa sekarang ini, pendekatan pendidikan Islam berlangsung melalui proses operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model yang melandasinya, sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi. Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan kebutuhan perkembangan manusia yang dipadukan dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada, sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di segala aspek kehidupannya.

Tetapi apa yang terjadi, kondisi pendidikan Islam pada saat ini, mendapat sorotan tajam yang kurang menggembirakan dan dinilai menyandang “keterbelakangan” dan julukan-julukan yang lain, yang semuanya bermuara pada kelemahan yang dialaminya. Kelemahan pendidikan Islam dilihat justru terjadi pada sektor utama, yaitu pada konsep,⁵ sistem, dan kurikulumnya, yang dianggap mulai kurang relevan dengan kemajuan peradaban umat manusia dewasa ini atau tidak mampu menyertakan disiplin-disiplin ilmu lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

⁵Muhammad Naquib al-Attas menyebut pendidikan Islam sebagai konsep yang meliputi konsep agama (*din*), konsep manusia (*insan*), konsep ilmu (*'ilm* dan *ma'rifah*), konsep kebijakan (*hikmah*), konsep keadilan (*adl*), konsep amal (amal sebagai adab), serta konsep perguruan tinggi (*kulliyatul jami'ah*). Muhammad Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1984), hlm.8.

Kenyataan ini, menunjukkan bahwa pendidikan Islam belum dapat dikatakan telah berjalan dan memberikan hasil secara memuaskan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa pendidikan Islam belum mampu menjawab arus perkembangan zaman yang sangat deras, seperti timbulnya aspirasi dan idealitas yang serba multiinteres dan berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang sangat beragam, serta perkembangan teknologi yang sangat pesat.⁶

Melihat kenyataan ini, maka pendidikan Islam perlu mendapat perhatian yang serius dalam menuntut pemberdayaan yang harus disumbangkannya, dengan usaha menata kembali keadaannya, terutama yang ada di Indonesia. Keharusan ini, tentu dengan melihat keterkaitan dan peranannya dalam usaha pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga perlu ada terobosan seperti perubahan model dan strategi pelaksanaannya dalam menghadapi perubahan zaman.

Usaha penataan kembali akan memperoleh keuntungan majemuk, karena, *pertama*, Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional di Indonesia, akan dapat memperoleh dukungan dan pengalaman yang positif. *Kedua*, Pendidikan Islam dapat memberikan sumbangan dan alternatif bagi pembenahan sistem pendidikan di Indonesia dengan ragam kekurangan, masalah, dan kelemahannya. *Ketiga*, sistem Pendidikan Islam yang dapat dirumuskan akan memiliki akar yang lebih kokoh dalam realitas kehidupan kemasyarakatan.⁷

Amin Abdullah⁸ mengatakan bahwa ciri pendidikan agama di era klasik skolastik yaitu sifatnya yang terlalu menekankan bahwa keselamatan individu terletak pada hubungannya dengan Tuhan, kurang begitu memberi tekanan yang baik antara individu dengan individu lainnya.⁹ Dengan demikian jangan salahkan jika anak kurang peka terhadap nasib, penderitaan, kesulitan yang

⁶Hifni Muchtar, "Fakta dan Cita-cita Sistem Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal UNISIA*, No.12 Th.XIII, (UII Yogyakarta), hlm. 52.

⁷Suyata, "Penataan Kembali Pendidikan Islam pada Era Kemajuan Ilmu dan Teknologi", *Jurnal UNISIA*, No.12 Th.XIII, (UII Yogyakarta), hlm. 23

⁸Sumartana, *Pluralisme...*, hlm. 252

⁹Perbedaan asumsi dasar filosofis tersebut besar sekali implikasinya dan konsekuensinya dalam menyusun muatan materi, silabi, kurikulum pendidikan agama-agama di sekolah-sekolah.

dialami oleh sesamanya, yang mungkin kebetulan memeluk agama lain. Fokus Pendidikan Islam bukan terletak pada kemampuan siswa melakukan ritual dan keyakinan tauhid, tetapi juga tidak kalah pentingnya menumbuhkan akhlaq sosial dan kemanusiaan.

B. Analisis Pemikiran Pluralisme KH. Abdurrahman Wahid dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam.

. Penulis sadar bahwa KH. Abdurrahman Wahid bukanlah seorang tokoh pendidikan¹⁰ namun ide-ide progresif dan wawasan keislaman serta kecintaannya terhadap budaya Indonesia tidak diragukan lagi. Ia salah satu tokoh yang telah memberikan sumbangan besar bagi NU yaitu: melakukan dobrakan dengan ide-ide progresif dan terkadang liberal. Ia berusaha mengkombinasikan antara pemikiran Islam klasik (dunia pesantren) dengan dunia Barat (*liberal*). KH. Abdurrahman Wahid pengetahuan dan pengalamannya di dunia pendidikan cukup lama.

Berangkat dari hal di atas apa salahnya jika penulis mengambil dan menganalisa pemikiran KH. Abdurrahman Wahid untuk dijadikan renungan bagi dunia pendidikan kita. Ide-ide KH. Abdurrahman Wahid sebagian besar muncul karena melihat realitas masyarakat Indonesia serta kecintaannya pada bangsa Indonesia, tidak terkecuali Islam. Lembaga pendidikan merupakan bagian kecil dari masyarakat dan cerminan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu proses transformasi nilai-nilai kebangsaan dan religius seharusnya dimulai dari bangku pendidikan, dari TK sampai pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang lainnya.

Tantangan yang terus datang bertubi-tubi terhadap Islam secara umum dan lebih khusus terhadap Pendidikan Islam dalam menyikapi perkembangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan kemajuan iptek di sisi lain. Pertama, upaya pemahaman ajaran Islam yang lebih lebih inklusif, toleran dengan mempertimbangkan umat, perkembangan zaman, budaya

¹⁰Jarang ditemukan bahkan hampir tidak ada tulisan Abdurrahman Wahid yang membahas dunia pendidikan secara rinci namun kebanyakan tulisannya ditujukan kepada keislaman dan kemasyarakatan serta kebudayaan baik itu mengenai demokrasi maupun HAM.

setempat. Kedua, kualitas SDM yang dihasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian perlu ditinjau ulang lembaga pendidikan dan proses pengajaran, baik mengenai alat, metode, orientasi maupun metodologi serta pendekatan yang digunakan selama ini.

Dengan demikian problem yang dihadapi umat Islam dan lembaga pendidikan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Hal ini memerlukan keseriusan dan kerja keras dari semua pihak serta usaha yang melelahkan dan memakan waktu yang panjang. Dengan demikian hal ini merupakan suatu keharusan, oleh karena itu usaha pembenahan Pendidikan Islam harus terus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Berangkat dari pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dalam menyikapi pluralitas masyarakat Indonesia, penulis mencoba menemukan ide-idenya dan berusaha memahami ide-ide tersebut dan lebih lanjut dianalisa guna dijadikan telaah dalam menyikapi nasib dunia Pendidikan Islam yang semakin tidak menentu. Adapun ide-ide KH. Abdurrahman Wahid telah dijelaskan pada bab III, selanjutnya penulis mencoba menganalisa ide-ide KH. Abdurhaman Wahid untuk dijadikan masukan bagi dunia Pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam proses pengajaran Pendidikan Islam di Indonesia yaitu:

1. Paradigma agama: antara Inklusif dan Eksklusif

Sikap atas keragaman pemahaman keagamaan telah dicontohkan oleh para imam madzab terdahulu. Perbedaan cara pandang terhadap ajaran Islam mereka sikapi dengan rasa hormat dan toleransi. Karena pemahaman yang berbeda itu menjadi kekayaan tersendiri dan merupakan khazanah intelektual peradaban Islam. Hal ini menjadi perhatian bagi generasi sekarang apakah kita terima apa adanya atau perlu dikaji dan didialogkan dengan kondisi riil masyarakat: modern dan globalisasi.

Kalau memang Islam itu *rahmatan lil alamin* yang cocok untuk semua zaman dan tempat maka sudahkah ajaran Islam dapat menjawab problem sosial masyarakat saat ini. Dalam menjawab kebuntuan umat di atas maka dibutuhkan jawaban yang dapat menyejukkan umat, oleh karena

itu diperlukan rekonstruksi pemahaman agama yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian paradigma pemahaman keagamaan yang eksklusif, intoleran sudah selayaknya dikubur dalam-dalam karena tidak relevan dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Seorang eksklusivis cenderung berusaha memonopoli kebenaran, tertutup, tidak mau mendengar dan memahami orang lain, dan kecenderungan bersikap otoriter. Sikap monopoli kebenaran pada gilirannya membuat seseorang mempunyai hak istimewa untuk menentukan mana agama yang benar dan mana yang sesat. Sikap sekelompok orang muslim tertentu yang memandang *syi'ah* sebagai aliran sesat dan karena itu dilarang hidup di Indonesia merupakan contoh empiris monopoli kebenaran.¹¹ Kecenderungan ini memperlihatkan mudahnya seseorang menghukumi orang lain dengan kejam dan tidak manusiawi. Paradigma hitam-putih, benar-salah, surga-neraka, telah menyelimuti umat beragama selama berabad-abad. Fenomena ini menggambarkan bahwa di kalangan umat Islam sendiri belum adanya sikap terbuka terhadap perbedaan orang Islam lainnya lebih-lebih terhadap agama lain.

Kalau cara pandang demikian masih tetap dipertahankan oleh umat Islam di Indonesia saya tidak yakin Islam akan menjadi *rahmat* bagi orang muslim sendiri, lebih-lebih *rahmatan lil 'alamin*. Oleh sebab itu yang dibutuhkan umat saat ini adalah pemahaman ajaran Islam yang lebih inklusif baik intern maupun ekstern umat beragama serta pemahaman yang lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Peran Pendidikan Agama sangat urgen dalam pemberantasan eksklusifitas keagamaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan wadah yang paling efektif dan efisien dalam upaya melakukan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan religius kepada peserta didik

¹¹Sumartana, *Pluralisme...*, hlm. 228

¹²Kebijakan MUI tentang pengharaman “selamat natal” kepada umat Nasrani merupakan bukti masih nampaknya pemahaman keagamaan yang eksklusif di kalangan muslim. Lantas apakah dengan ucapan selamat natal atau selamat idul fitri menjadi seseorang pindah agama. Padahal penciptaan iklim yang damai dan aman lebih penting dari itu semua.

mulai dari bangku TK sampai pada perguruan tinggi. Selama ini praktik Pendidikan Agama Islam masih bersifat kaku dan sentralistik. Hal ini terlihat dari pola pembelajaran yang masih bersifat mendekte siswa, siswa harus sama¹³ dengan guru ketika berbeda dengan atas (guru, kepala sekolah, pemerintah) siswa diberi label salah, berdosa dan terkadang dibarengi sikap curiga dan sentimen.

Berkaitan dengan hal di atas terlihat jelas bahwa proses pendidikan agama lebih menekankan pada keselamatan yang didasarkan pada hubungan individu dengan Tuhannya dan kurang menekankan keselamatan didasarkan pada hubungan individu dengan individu lain. Perbedaan asumsi dasar dan filosofi cara memperoleh keselamatan ini menurut Amin Abdullah sangat besar sekali implikasi dan konsekuensinya dalam menyusun muatan materi dan silabi serta kurikulum Pendidikan Islam di sekolah-sekolah.¹⁴ Dan sangatlah wajar jika anak didik kurang begitu sensitif dan kurang peka terhadap nasib, penderitaan, kesulitan yang dialami oleh sesama, yang kebetulan berbeda dengannya.

2. Pendidikan Islam: Humanis dan Egalitarian

Konflik yang banyak terjadi di Indonesia membuktikan telah terjadi *missing link* antara pendidikan agama dan dengan pendidikan nilai. Oleh karena itu perlu adanya penambahan kurikulum Pendidikan Islam yang sifatnya universal: nilai-nilai *humaniora* (kemanusiaan). Penambahan nilai-nilai universal dalam pendidikan bukan berarti ingin menonjolkan sifat-sifat liberal Pendidikan Islam namun dimaksudkan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai universal anak didik akan dapat mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemanusiaan menjadi agenda penting dalam proses pendidikan. Karena pendidikan tidak saja berkaitan transfer pengetahuan yang sifatnya

¹³Hal ini pernah terjadi pada penulis ketika melakukan PPL di SMA 8 Semarang di mana materi yang harus disampaikan harus sesuai dengan pemahaman keagamaan guru sekolah padahal penulis tahu bahwa siswa beraneka ragam.

¹⁴Amin Abdullah, "Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama", *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi 11 Tahun 2001, hlm. 13

keilmuan namun ada sisi lain yang lebih penting dari pendidikan yaitu suatu proses internalisasi nilai kepada anak didik. Oleh karena itu fokus pendidikan tidak hanya terletak pada aspek kognitif semata namun aspek afeksi dan psikomotor menjadi agenda penting yang tidak dapat dikesampingkan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa dan dengan orang lain.

Dari pernyataan di atas ada sebuah pertanyaan yang cukup menggoda: bagaimana praktik Pendidikan Islam –dalam hal ini pelaksanaan pengajaran- telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan? Ataukah sebaliknya. Di sinilah peran Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia menjadi urgen untuk memulai dan menerapkan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan serta kesetaraan tanpa ada diskriminasi.

Proses pembelajaran (materi agama) yang berlangsung di sekolah selama ini lebih bersifat eksklusif. Hal ini terlihat proses pembelajaran yang tidak memberikan ruang pada siswa untuk berbeda pendapat dengan guru. Ketika siswa berbeda dengan guru maka dengan mudah diberi label dosa dan ancaman neraka. Materi pelajaran agama (Islam) bernada penyeragaman yang tidak sesuai pluralitas siswa itu sendiri. Pendidikan Islam lebih cenderung pada proses indoktrinasi tunggal tentang kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi.

Ruang kelas bagaikan penjara tanpa peluang kreatif dan inovatif. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan “membentuk kepribadian muslim berakhlak mulia” dan seterusnya. Tujuan ini diberlakukan untuk semua jenis, jenjang, bidang studi. Pendidikan hanyalah keinginan atasan (guru dan para elit penguasa) bukan sebaliknya pendidikan untuk membimbing dan mendampingi peserta didik dengan segala problem kehidupan dan keadaan masyarakat di mana ia berada.

Siswa sebagai layaknya manusia mempunyai kebebasan mengekspresikan potensi yang dimilikinya: berpikir kritis, inovatif serta kreatif, namun justru potensi ini dipasung di lembaga pendidikan.

Kekerasan sistemik di ruang kelas mengisyaratkan kemanusiaan belum diperhatikan, siswa dianggap mesin foto copy yang harus mengikuti kemauan atasan dan materi pendidikan agama berupa instan yang datang dari penguasa. Meletakkan siswa pada obyek pendidikan bukan pada subyek pendidikan dengan sendiri akan mematikan posisi manusia yang secara kondrati berpotensi untuk berkembang. Dengan begitu peran sekolah berubah fungsi melakukan pendampingan kepada peserta didik tetapi lebih pada menciptakan manusia-manusia mesin/robot. Kalau model pembelajaran masih seperti itu maka penciptaan manusia Indonesia yang seutuhnya (insan kamil) hanya utopia belaka.

Ada semacam kecenderungan mempertahankan konsep-konsep pendidikan agama yang lama (yang dianggap telah teruji dan mujarab) dipercayai pasti jauh lebih baik. Dan keenganan untuk mengambil konsep yang baru (aktual) yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan zaman dan pluralitas masyarakat. Proses belajar harus lebih melibatkan keaktifan belajar siswa yang berbeda latar belakang ternyata memberi pengaruh positif dari pada pola penyeragaman perlakuan terhadap mereka. Pola pembelajaran yang cenderung satu arah (monolitik) dari pihak guru justru menjadikan siswa jenuh dan kurang bisa menghormati pendapat temannya yang berbeda dengan dirinya -tidak adanya diskriminasi terhadap siswa yang berbeda. Pola yang demikian akan menyebabkan siswa mendapatkan kekayaan wawasan pengetahuan yang kemudian terjadi proses berpikir panjang untuk menentukan pilihan-pilihan dalam mengambil sikap.

3. Demokratisasi Pendidikan

Lembaga pendidikan di berbagai negara termasuk Indonesia merupakan alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan yang diambilpun bersifat sentralistik: berasal dari atas bukannya

kebijakan diambil dari bawah yaitu: melalui proses komunikatif dan akomodatif yang memihak rakyat. Dengan kata lain pendidikan tidak lagi mendewasakan dan membebaskan manusia dari penindasan. Demi tegaknya demokratisasi pendidikan maka campur tangan penguasa (pemerintah) harus hindari, bukan sama sekali ditiadakan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam institusi pendidikan yaitu sebagai fasilitator. Sedangkan pada dataran praktis berkaitan dengan pelaksanaan dan penyusunan materi diserahkan kepada kepada rakyat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Pendidikan merupakan sebuah proses di mana manusia menemukan eksistensi diri: proses berpikir, berpendapat dan seterusnya merubah hidupnya lebih bermakna dan beradab. Sistem sentralisasi yang selama ini dijalankan dinilai telah menyumbat daya kritis dan kreatifitas anak didik. Hal ini terlihat dalam Pendidikan Agama Islam: guru sebagai “sentral” yang selalu benar, lengkap bebas kritik dan siswa pada posisi bawah harus sesuai dengan “atas”. Dengan demikian tugas Pendidikan Islam adalah menumbuh kembangkan potensi peserta didik dengan daya kreatifitas yang dimilikinya.

Dalam berdemokrasi kita harus melindungi dan menghormati mereka yang minoritas. Dengan demikian lingkungan Pendidikan Islam harus membiasakan berbeda pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam memahami agama, karena hasil apapun pemahaman manusia tentang ajaran bersifat relatif adanya. Dengan cara demikian maka akan terjadi untuk menghormati nilai-nilai pluralitas manusia.

Membiasakan anak didik untuk berpikir secara kritis, analisis, inovatif dan kreatif: mendialogkan pengetahuan yang didapat di bangku sekolah dengan realitas empiris masyarakat. Sehingga dengan demikian akan terjadi proses perenungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan realitas sosial akan memungkinkan siswa tumbuh dengan penghormatan atas pluralitas yang unik. Dengan demikian anak didik akan terus mendialogkan pengetahuan dengan perkembangan zaman.

4. Penuh Etika dan Moral

Pendidikan agama sebagai upaya transformasi nilai-nilai religius yang penuh dengan moralitas dan etika kemanusiaan terjebak pada formalisme simbol-simbol keagamaan yang semu yaitu: rutinitas dan keajekan beribadah, dan belum dapat menyentuh etika (moral) sosial secara umum. Dengan demikian pendidikan agama belum menyentuh pada substansi dan esensi dari nilai-nilai religius yaitu penuh dengan kesalehan sosial dengan tidak mengenyampingkan ibadah yang bersifat *ubudiyah*. Padahal ruh Pendidikan Islam terletak dalam nilai-nilai religius.¹⁵

Seperti yang dikatakan al Attas bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah menciptakan individu yang beradab yaitu: individu yang sadar akan individualitasnya dan hubungan yang tepat dengan diri, Tuhan, masyarakat dan alam sekitar baik yang tampak maupun yang gaib.¹⁶ Dengan kata lain seorang individu mempunyai tanggung jawab dengan Tuhan atas tindakannya serta bertanggung jawab secara moral dengan masyarakat (sosial), dan alam semesta.

Jadi, adanya upaya memadukan kesalahan personal dan kesalahan sosial: keselamatan insaniyah, kemaslahatan basyariyah, serta keselamatan alam. Pendidikan tidak semata memicu kecerdasan yang bersifat kognitif semata, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yaitu: perilaku kongrit terhadap sosial kemasyarakatan.

¹⁵Selalu mengambil kebijakan dengan pikiran dingin dan kearifan budi pekerti serta dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang selalu bisa menggunakan nalarnya secara benar dan obyektif dan menentukan pilihan tepat dan menolak cara kekerasan. Kecerdasan dan kearifan bersumber dari daya kritis dan kesadaran atas nilai diri dan sosial, sehingga tumbuh kepedulian pada sesama.

¹⁶M. Naquib al Attas, *Filsafat...*, hlm. 189